

**PRAKTIK NIKAH ULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

M. APRIZAL HUSNI

NPM 1421010326

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**PRAKTIK NIKAH ULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

M. APRIZAL HUSNI

NPM 1421010326

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Pembimbing I

:Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H

Pembimbing II

:Yufi Wiyos Rini Masyukuroh, S. Ag., M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2021 M**

ABSTRAK

Pernikahan ulang (*tajidun nikah*) adalah pembaharuan akad nikah terhadap pernikahan yang sudah sah menurut syara' kemudian dengan maksud *ihtiyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi. Pelaksanaan pernikahan ulang ini hampir sama dengan akad nikah yang pertama. Meskipun tidak ada ketentuan yang pasti sebagai payung hukum baik hukum syar'i maupun hukum positif, namun praktik pernikahan ulang dijadikan solusi dalam rangka memperbaiki pernikahan dan bukan mengulangi akad nikah. Salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan ulang adalah masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut melakukan pernikahan ulang, seperti faktor pernikahan yang tidak direstui, faktor berpisah (bukan cerai), faktor hamil di luar nikah, dan faktor adat. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan tradisi pernikahan ulang dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat merupakan adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat hubungan rumah tangga dan menciptakan keharmonisan rumah tangga tersebut, sehingga nikah ulang ditinjau dari hukum Islam maupun hukum Positif adalah boleh. Dengan alasan bahwa nikah ulang tersebut bertujuan untuk memperbaharui akad bukan untuk membuat akad baru. Akibat hukumnya akad pernikahan yang pertama tidak rusak karena *tajdid* akad hanya memperbaharui akad bukan memfasakh akad yang pertama. Tradisi nikah ulang (*tajdid an-nikah*) tersebut dilakukan dalam bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian). Tradisi tersebut dapat dikategorikan *urf* yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga Islam tidak melarang adanya tradisi nikah ulang tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aprizal Husni

Npm : 1421010326

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis,



M. Aprizal Husni
NPM. 1421010326



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **PRAKTIK NIKAH ULANG DALAM PERSPEKTIF
Skripsi : HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus
pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**
Nama : **M. Aprizal Husni**
NPM : **1421010326**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP.195512251985031002

Yufi Wivos Rini Mas'ukuroh, S. Ag., M.S.I
NIP. 197304142000032002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PRAKTIK NIKAH ULANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)"** disusun oleh **M. Aprizal Husni Npm 1421010326** Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji Utama : Dr. H. Nurnazli, S. Ag., S.H., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M.Si.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**A. Khairuddin, M.H.
IP. 196210221993031002**

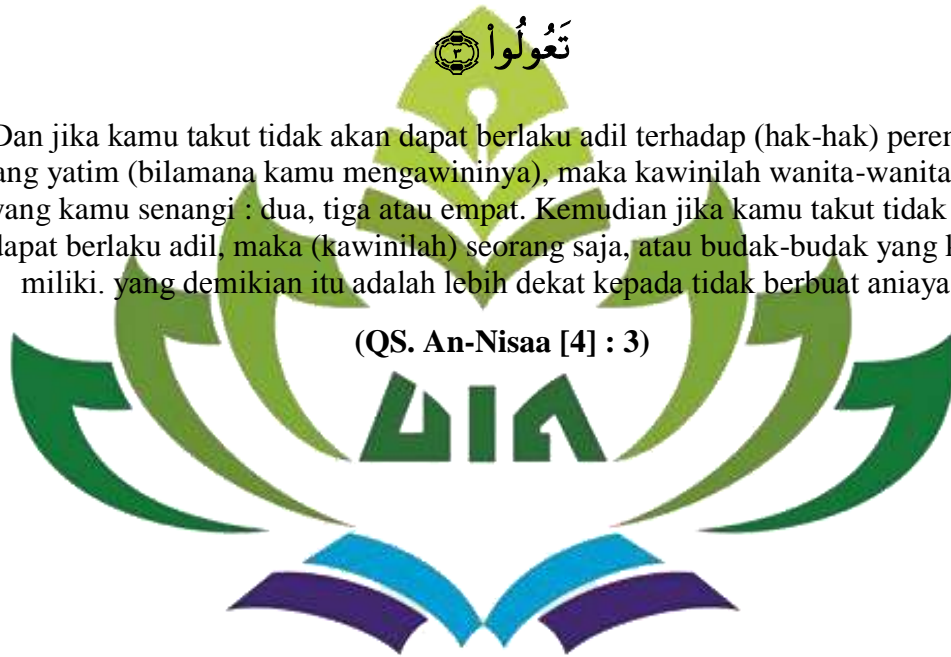
MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا

تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹

(QS. An-Nisaa [4] : 3)



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 115.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ibuku Desi Deriyah Herawati dan ayahku Haji Syarifuddin yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materil, dan senantiasa membimbingku dengan sangat baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Adikku tersayang Rahmah, Iqbal, dan Winda yang selalu mendukung dan memberi semangat;
3. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. S. I, yang memberikan bimbingan dengan sangat baik;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

M. Aprizal Husni lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 16 April 1996. Anak pertama yang terlahir dari pasangan Bapak Haji Syarifuddin dan Ibu Desi Deriyah Herawati.

Riwayat pendidikannya di Sekolah Dasar SDN 1 Way Dadi Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MAN 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung,
Penulis,

M. Aprizal Husni
NPM. 1421010326

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur *alhamdulillah rabbil'alam* saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

3. H. Rohmat, S. Ag., M.H.I, selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. S. I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dewan penguji sidang skripsi terdiri dari ketua sidang bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H., sekretaris bapak Hasanuddin Muhammad, M.H., penguji utama ibu Dr. H. Numazli, S. Ag., S.H., M.H., penguji II bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. dan penguji III ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M.Si.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
7. Semua nara sumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2014;
9. Teman-teman KKN.

Bandar Lampung,
Penulis,

M. Aprizal Husni
NPM. 1421010326

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 8 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian | 8 |
| G. Signifikasi Penelitian | 9 |
| H. Metode Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 15 |
| A. Pernikahan dalam Hukum Islam | 15 |
| 1. Pengertian Pernikahan..... | 15 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Pernikahan | 24 |
| 4. Wakalah dalam Pernikahan..... | 27 |
| B. Pernikahan dalam Hukum Postif..... | 36 |
| 1. Pengertian Pernikahan..... | 36 |
| 2. Dasar Hukum Positif | 40 |
| 3. Rukun dan Syarat Pernikahan | 44 |
| C. Konsep Nikah Ulang | 52 |
| D. Tinjauan Pustaka | 56 |
| | |
| BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN..... | 60 |
| A. Gambaran lokasi penelitian..... | 60 |
| 1. Sejarah Singkat Kecamatan Pesisir Tengah | 60 |
| 2. Keadaan Demografis dan Geografis Kecamatan Pesisir Tengah..... | 60 |
| 3. Keadaan Penduduk di Kecamatan Pesisir Tengah | 62 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Keadaan Ekonomi di Kecamatan Pesisir Tengah | 63 |
| 5. Keadaan Sosial Budaya di Kecamatan Pesisir Tengah | 64 |
| B. Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah | 65 |
| 1. Pelaksanaan Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat..... | 68 |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat | 71 |
| BAB IV ANALISIS DATA..... | 74 |
| A. Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah | 74 |
| B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Rekomendasi..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Pembagian wilayah Pesisir Tengah..... | 62 |
| 2. Kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah..... | 63 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah “**Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**” (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Nikah Ulang

Dalam tradisi masyarakat muslim, ada cara yang biasa ditempuh untuk menghindari perceraian. Cara ini biasanya dilakukan di saat pasangan sedang hebat-hebatnya menghadapi konflik. Cara itu lazim disebut tajdidun nikah atau memperbaharui nikah. Jadi, memperbaharui nikah adalah proses pernikahan yang dilakukan lagi oleh orang yang sudah menikah.²

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa adalah syari'at Islam. Kata syari'at secara etimologi berarti "jalan yang dapat dilalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45.

umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.³

3. Hukum Positif

Hukum Positif adalah Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁴

Dari penjelasan penegasan judul di atas maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Desa Pahlung Pesisir Barat).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah:

1. Alasan objektif

Permasalahan pernikahan yang terjadi terhadap pihak-pihak yang telah melakukan tradisi nikah ulang. Pihak-pihak tersebut melakukan pernikahan secara berulang-ulang setiap tahunnya. Hal tersebut biasa dilakukan dengan alasan untuk melupakan konflik pada pernikahan tahun sebelumnya agar pernikahan pada tahun selanjutnya lebih harmonis.

³Moh Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na'im *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 91.

⁴ *Unpas Hukum.blogspot.com*, (diakses pada 21 Oktober 2019)

2. Alasan Subjektif

Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan jurusan Ahwal Al-Sakhshiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

C. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Seperti yang di jelaskan oleh ayat di bawah ini.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah (9):71)

أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An Nuur (24):26)

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan

administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Permasalahan nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah yaitu pada desa Rawas dan desa Pahlungan tersebut merupakan sebuah tradisi yang dilakukan warga khususnya yang telah berumah tangga. Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah, salah satunya pernikahan ulang yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama Brazi dan Susi.

Pernikahan ulang tersebut dilakukan untuk memperbaharui pernikahan yang bertujuan untuk hubungan kedepannya menjadi lebih harmonis. Kebiasaan atau adat tersebut dalam Islam biasa disebut *urf*⁷. Antara Urf dengan adat istiadat ada persamaan namun juga ada perbedaan yaitu Tradisi nikah ulang, Dalam tradisi masyarakat muslim, ada cara yang biasa ditempuh untuk menghindari perceraian. Cara ini biasanya dilakukan di saat pasangan sedang hebat-hebatnya menghadapi konflik. Cara itu lazim disebut *tajdidun nikah* atau memperbaharui nikah. Jadi, memperbaharui nikah adalah proses pernikahan yang dilakukan lagi oleh orang yang sudah menikah.

Permasalahan nikah ulang ini bisa ditemui dalam beberapa keluarga yang memiliki problem rumit. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesiapan dari kedua pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki) sehingga ketika menghadapi suatu masalah mereka rentan menggunakan emosi. Keadaan emosi yang meluap-luap akan berakibat buruk seperti perbincangan antara suami istri yang tidak pantas akan terucap jadi terucap dikarenakan emosi. Permasalahn seperti ini yang mendasari hubungan pernikahan menjadi renggang. Setelah terjadi permasalahan tersebut salah satu dari mereka (suami dan istri) ingin memperbaiki hubungan pernikahannya dan mereka berdua menyetujui. Maka akan dilakukan pernikahan ulang yang akan dihadiri penghulu yang akan memimpin pernikahan dan disaksikan oleh salah satu dari keluarga mereka ataupun keluarga dari keduanya.

Beberapa kasus lainnya ada pasangan suami isteri yang melakukan pembaruan pernikahan atau nikah ulang baik ada masalah ataupun tidak ada

masalah mereka tetap memperbaharu pernikahannya. Menurut mereka, memperbaharui nikah ternyata banyak hikmahnya. Setidaknya ia merasa komitmen terhadap pasangan makin menguat. Saya memaknai, memperbaharui nikah ini semacam *recharge* yang mengisi ruang kosong pasangan akibat lamanya menjalani kebersamaan. Pernikahan ulang juga bisa membantu perbaharuan keharmonisan dalam rumah tangga, meningkatkan rasa cinta kasih dan sayang terhadap pasangan.

Kebiasaan masyarakat yang melakukan nikah ulang ini dijadikan adat pada desa Pahlungan dan desa Rawas. Dalam hal ini adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam tidur jam sekian, makan dan mengonsumsi jenis makanan tertentu. Adat juga muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis, cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti suap, pungli dan korupsi. “Korupsi telah membudaya, terjadi berulang-ulang dan dimana-mana”. Sedangkan *urf* tidak terjadi pada individu. *urf* merupakan kebiasaan orang banyak. Kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan. Urf bagian dari *adat*, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. Dengan judul “ Tradisi Nikah Ulang

Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Kecamatan Pesisir Tengah)”

D. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah, yaitu:

1. Permasalahan tradisi nikah ulang yang terjadi di kecamatan pesisir tengah khususnya Desa Sukanegara dan Desa Pahmungan.
2. Selain tradisi nikah ulangnya, fokus masalah yang kedua adalah tentang nikah ulang dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

E. Rumusan masalah

1. Bagaimana Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tradisi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah?

F. Tujuan Penelitian

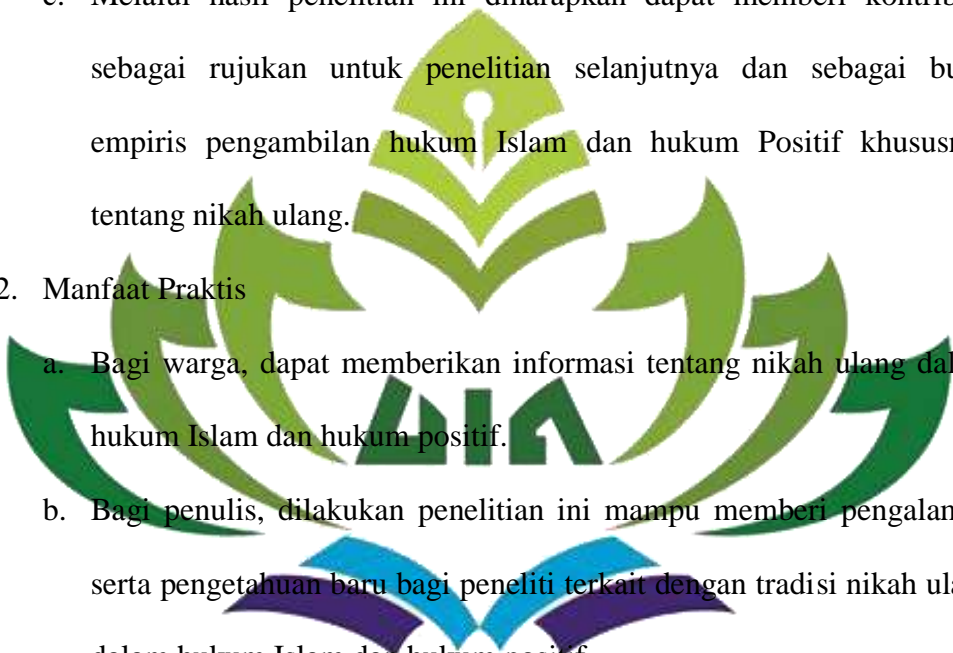
1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi nikah ulang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap tradisi nikah ulang.

G. Signifikansi Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 
- a. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang tradisi nikah ulang dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi dan pihak-pihak terkait.
 - c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bukti empiris pengambilan hukum Islam dan hukum Positif khususnya tentang nikah ulang.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi warga, dapat memberikan informasi tentang nikah ulang dalam hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Bagi penulis, dilakukan penelitian ini mampu memberi pengalaman serta pengetahuan baru bagi peneliti terkait dengan tradisi nikah ulang dalam hukum Islam dan hukum positif.
 - c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca terkait masalah tradisi nikah ulang dalam hukum Islam dan hukum positif. Selain itu sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Penulisan ini, peneliti menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data.

Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. Dimana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pesisir Tengah. dan di kantor KUA Kecamatan Pesisir Tengah..

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menyajikan, menguraikan, dan menganalisa menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang didapat melalui kegiatan *interview*.

Narasumber tersebut adalah warga dan penghulu yang terkait masalah nikah ulang tersebut di Kecamatan Pesisir Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literature, arsip-arsip, serta peraturan-peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini pada Kecamatan Pesisir Tengah. Kecamatan Pesisir Tengah terdiri dari 7 desa, yang berlokasi di Desa Rawas dan Desa Pahlungan.

b. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. Teknik yang dimaksud adalah sampling yaitu metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi. Populasi yang ada berjumlah 7 orang, sehingga semua populasi dijadikan responden yang terdiri dari tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, tokoh agama 1 orang, dan 4 orang yang telah melakukan nikah ulang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang kongkret mengenai suatu penelitian.⁵ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.⁶ Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pesisir Tengah khususnya desa Sukanegara dan desa Pahlungan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet ke- 7* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) ,h.115.

⁶Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.202.

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁷ Dalam hal ini penulis meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).⁸ Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.

c. Sistematisasi data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁹ Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.128.

⁸ *Ibid.*, h.126.

⁹ Sutrisno hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*...., h.202.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

¹⁰ *Ibid*, h.80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹¹ Kata “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “*Zawaj*” yang dari bahasa arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul dan mendidih atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad dan bersetubuh” yang secara syarat berarti akad pernikahan.

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqh disebut “*milku al-intifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹² halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹³

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.¹⁴ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan

¹²Ahmad Sudirman Abas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazh* (Jakarta:Prima Heza Lestari, 2006), h. 1.

¹³M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. h. 1.

¹⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

¹⁵Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), (*Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016), h. 227.

dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam¹⁶.

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni. Di dalam hukum Islam perkawinan memiliki dalil naqli yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya) (Qs-Annisa ayat [3]).¹⁷

Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸ Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan

¹⁶Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

¹⁷A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Cet., Ke-3. h. 261-262.

¹⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Nikah* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet., Ke-2. h. 32.

jantan dan betina secara seksual¹⁹. Dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan *An-Nikah* dan *Az-Ziwaj az-zawaj*, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. Kata Nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat : 230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Qs. Al-Baqarah [2] : 230).²⁰

Ketentuan-ketentuan ini telah dituangkan di dalam firman Allah Swt antara lain berbunyi:

وُذِشِبْحُ الرَّعْدِ بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خِفَتِهِ ۚ وَرُيْسُ الصَّوَاعِقِ فَيْصِبُ
بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجْعَدُونَ ۚ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. h. 518.

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), Cet., Ke-2. h. 36.

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan (Qs. Ar-Ra'ad : [13]).²¹

Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Qs. An-Nuur: [32]).²²

Arti Nikah menurut para *Ahli Ushul*, sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “akad”, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti “bersetubuh” dengan lawan jenis.

b. Ulama Hanafiyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “bersetubuh”, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti “akad” yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.

c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua

²¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), Cet., Ke-1. h. 41.

²² Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2009), Cet., Ke-1. h. 11-12.

pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus,²³ yaitu kata nikah sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”.²⁴

Adapun menurut *Ahli Fiqh*, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.²⁵

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan: Arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b. Subekti, mengemukakan: Arti perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: Arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam perturan tersebut baik agama maupun aturan Hukum negara.²⁶

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur- unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu hubungan hukum;

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 36-37.

²⁴ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. h. 53.

²⁵ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 54.

²⁶ Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet., Ke-2. h. 27-28.

- b. Adanya seorang pria dan wanita;
- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
- d. Dilakukan menurut undang-undang dan menurut hukum yang berlaku.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti “Nikah” menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.²⁷

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹ Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁰

²⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Su Laiman Mar'iy, T.,t.p), h. 30.

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), Cet., Ke-3. h. 43. Lihat juga, Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet., Ke-1. h. 3.

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Prkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, h. 43.

³⁰ Depag RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 128.

Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.³¹

Al-Qur'an telar mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.³²

Dalil Al-Qur-an:

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:³³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

³¹Khoirul Abror, *Hukum Perwakinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h. 47.

³²*Ibid.*, h. 48.

³³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 3-4

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (**An - Nisa : 3**).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:



Artinya: “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendala baginya”. (H.R. Bukhari-Muslim).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan

(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.³⁴

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a. Bukan mahram dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;

³⁴Tihamidan dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h. 12.

- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnya; dan
 - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali:
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Adil; dan
 - e. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi:
 - a. Laki-laki (minimal dua orang)
 - b. Baligh;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Syarat-syarat ijab qabul:
 - a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami



- c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁵

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

4. Wakalah dalam Pernikahan

a. Pengertian Wakalah

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”.

Secara terminologi (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha:

- 1) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini

³⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, h. 57-58.

Artinya: “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.

2) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

“Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup. Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena sa itu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anaka kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah*, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacarannya.³⁶

Muhammad Syaf’i Antonio, mengemukakan definisi *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 187.

Ada beberapa jenis *wakalah* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.
- 2) *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- 3) *Wakalah al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Mutlaqah*.³⁷

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

Muhammad Arafat Yusmad mengatakan *wakalah* ialah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* cet 7 (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 34.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *wakalah* melalui DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Praktek *wakalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang *wakalah* adalah pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.³⁸

b. Rukun dan Syarat Wakalah

1) Rukun Wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakalah*

a) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang berhak untuk bertindak.

b) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal.

Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut

³⁸Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* Cet 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 62-63.

Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dpat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.³⁹

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun *wakalah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti ucapan atau tidankan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “aku wakikan kepadamu untuk melakukn hal ini.” Sementara *qabul* berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “aku terima”. *Ijab* ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan.

Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun *wakalah* ada empat, orang yang mewakilkan (*muwakkil*),

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 189.

orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil bih*), dan *sighah* (*ijab* dan *qabul*). Rukun *wakalah* dalam KHES Pasal 457 ayat (1) adalah 1) *wakil*, 2) *muwakkil* dan 3) akad.

2) Syarat wakalah

a) *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:

(1) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Quran.

(2) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.

(3) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku*”.

b) *Shigat*, henaknya berupa lafal yang menunjukan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti “saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat qabul* si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap

sah.

Akad dalam *wakalah* terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah melakukan *ijab*, namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka *wakalah* semacam ini tidak sah. Syarat *sighah* yaitu, pertama, *wakala* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *sighah* tidak terikat dan terbatas oleh syara. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi'iyah.

Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad *wakalah* dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalnya dalam penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut.

Syarat yang terkait dengan orang yang menerima

perwakilan atau *wakil* adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam *wakalah* sah apabila adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, wakil harus mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut.⁴⁰

c) Landasan Hukum Wakalah

(1) Dasar hukum Wakalah dari Al-Quran, sebagai berikut:

Dasar hukum wakalah adalah firman Aallah swt, anatar lain sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
 أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
 أَحَدًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Cet 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 211-212

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (Q.S. Al-Khafi {18}: 19)⁴¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa {4}: 35)⁴²

(2) Dasar Hukum Wakalah dari Al-Hadis, sebagai berikut:

Hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan
wakalah, diantaranya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَارْفَعَ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ مَيْمُونَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah saw. Mewakikan kepada Abu Ra’i dan seorang Anshor untuk mewakikan mengawini Maimunah binti-Harits.” (Malil No. 678, kitab al-Muaththa“, babhaji)

⁴¹ Al-Quran surah Al-Khafi (18) ayat 19 (Tangerang: Norma Pustaka, 2011), 236

⁴² Al-Quran surah An-Nisa (04) ayat 35 (Tangerang: CV. Norma Pustaka, 2011), 66.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.⁴³

(3) Dasar hukum wakalah dari Fuqaha, sebagai berikut:

Jumhur ulama⁴⁴, seperti Malik, ats-Tsauri, Laits dan Syafi'i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashbah⁴⁴ tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Imam Syafi'i berkata: "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qorib „dekat“. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya."⁴⁵ Jika wanita menikahkan dirinya dengan atau tanpa izin walinya nikahnya itu batal dan tidak sah.

B. Pernikahan dalam Hukum Positif

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122.

⁴⁴Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah* Cet ke 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 99.

⁴⁵Tertib wali menurut Imam Syafi'i adalah: ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki ayah dan ibu, kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak paman dari ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari ayah, kemudian anak paman dari ayah, kemudian hakim (mereka ini disebut ashbah). Ini bermakna, seseorang tidak boleh menjadi wali nikah selama masih ada keluarga yang lebih dekat sebab ia lebih berhak dengan adanya pertalian ashbah. Jadi, asalnya ini hamper sama dengan hukum waris. Sekiranya seseorang diantara mereka menjadi wali nikah dengan tidak mematuhi susunan tersebut, tentulah nikahnya tidak sah.

1. Pengertian Pernikahan

Sebelum membahas masalah syarat- syarat perkawinan, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan mengenai pengertian perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Pengertian tersebut juga relevan dengan Al – Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang telah penulis uraikan sebelumnya..

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat. ⁴⁶Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada

⁴⁶K. Wantjik Saleh,, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976), h. 14-15.

kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing⁴⁷. Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

⁴⁷Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni,, 2006), h. 63

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

2. Dasar Hukum Positif

Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya bahwa hukum positif sendiri merupakan hukum yang berlaku bagi suatu

masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Tentunya hukum positif yang dianut oleh setiap negara didunia akan berbeda-beda sebagaimana macam-macam hukum publik . Hal tersebut tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai negara hukum tentunya di Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Meskipun di masa lalu terdapat hukum yang berlaku namun, hukum positif yang dimaksud disini tidak mencakup akan hal tersebut. Dalam kajian ini, hukum positif diartikan sebagai aturan hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk aturan hukum di masa lalu . Selain unsur “pada saat ini sedang berlaku,” didapati pula unsur-unsur lain dari hukum positif.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Baik hukum tertulis maupun tidak merupakan jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum tidak tertulis sebagaimana yang ada salah satu contohnya adalah hukum adat, sedangkan hukum yang tidak tertulis bukan hanya pidana dan perdata. Untuk merungkasnya lebih jelas, maka berikut Macam Macam Hukum Positif yang berlaku di indonesia.

a. Hukum Perdata

Negara Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Noapoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847

tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

1) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: [AdSense-C]

2) UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pada saat ini UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (pengubahan) yang dilakukan oleh MPR. Sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh.

3) Ketetapan MPR

Ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan produk hukum MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Contohnya Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

4) Undang-undang / Peraturan Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karna keadaan yang memaksa. Perpu dibuat presiden tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut.

5) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan menjalankan undang-undang. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan.

6) Peraturan Presiden

Keputusan Presiden adalah keputusan yang ditetapkan oleh presiden. Keputusan Presiden merupakan peraturan yang dibentuk presiden berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Keputusan Presiden dibuat dalam rangka menjalankan UUD 1945, UU, dan PP.

7) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

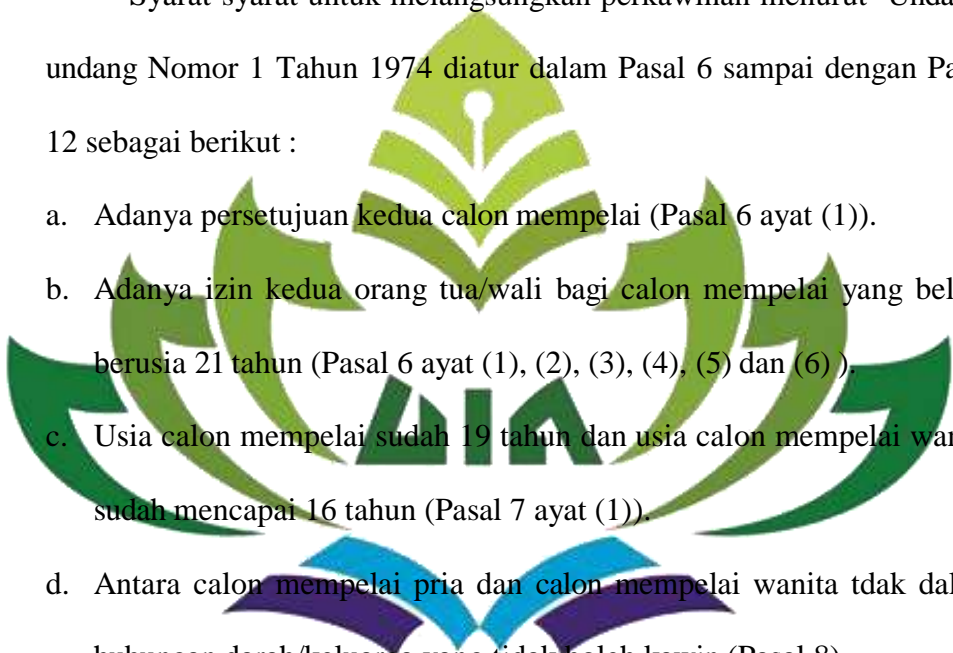
Macam-Macam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Tentunya dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi anda. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 
- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
 - b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
 - c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
 - d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
 - e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
 - f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
 - g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan :

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”

Pendapat Drs. H. Saidus Syahar, S.H. dalam bukunya yang berjudul Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam buku Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata menjelaskan sebagai berikut :

“Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar- benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”

a. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

b. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umum. Sehingga *perkawinan gantung* yang dikenal dalam masyarakat adatpun tidak diperkenankan lagi.⁴⁸

⁴⁸Prof. Mr. S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan* (Elemen. Bandung, 1974), h. 7.

- c. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama

atau peraturan lain tersebut⁴⁹. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut.⁶ Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.⁵⁰

d. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :
 “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 3 menyebutkan :

- 1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan

⁴⁹Drs. H. Saudus Syahar, S.H., *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* (Alumni, Bandung, 1976), h. 104.

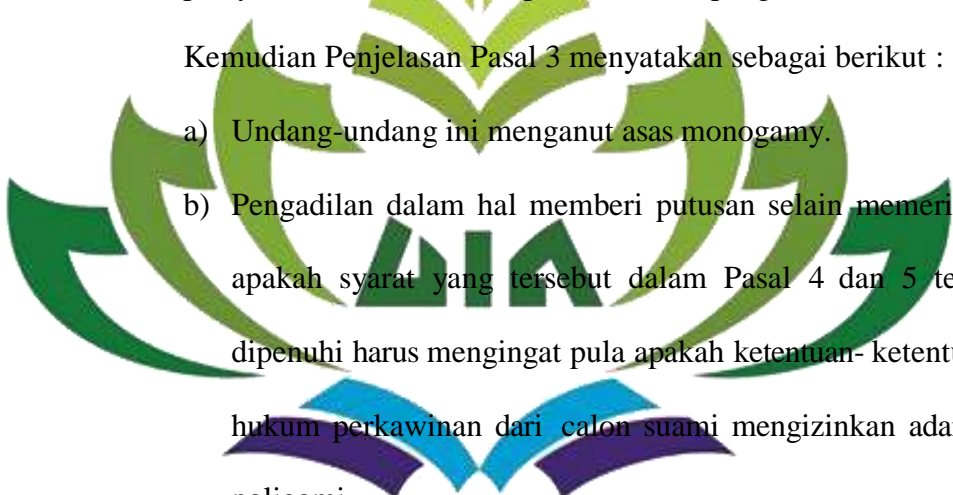
⁵⁰Hilman Hadikusumo, S.H., *Hukum Perkawinan Adat* (Alumni, Bandung, 1977), h. 104.

agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan :

“Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.”

Kemudian Penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

- 
- a) Undang-undang ini menganut asas monogamy.
 - b) Pengadilan dalam hal memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.

- e. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : “Apabila suami dan isteri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan :

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.”

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.

- f. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”.

Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan

C. Konsep Nikah Ulang

Kata “ulang” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah* (إعادة), *takrar* atau *takrir*. Secara etimologi *I'adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi⁵¹.

⁵¹ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwait*, (Kementerian Urusan Waqaf Dan Islam Kuwait), h. 177.

Sedangkan arti *I'adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama”. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I'adah* yaitu “melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*”. Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut “melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “melakukan sesuatu sekali lagi”. Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (إعادة) dalam Fiqh Islam. Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *i'adah*, yaitu *Takrar* (تكرار), *Qadha* (قضاء), dan *Istiknaf* (استئناف) dan *Tajdid* mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan.

Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I'adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja⁵².

Qadha adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i'adah* mengerjakan sebuah

⁵²Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam Bahasa* (النروق الغني), (Darul Afaq, Beirut), h. 30

perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu.⁵³

Adapun istilah *Istiknaf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.

Sementara istilah *Tajdid* secara etimologi memperbaiki dan secara terminologi dimaksudkan memperbaiki atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbaiki wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.

Terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid*. Konsep dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud,

⁵³ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausuw'ah al Fiqhiyyah al Kuwait...*, h. 177.

maka para fuqaha² telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*).

Tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.

Pandangan fiqih disebut *tajdid* nikah atau pembaruan nikah. *Tajdid* nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdidun* nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.⁵⁴

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Cut Nanda Mayasari (2017) dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Ar-Raniry, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Keluarga. Penelitian ini menarik pada permasalahan di mana terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. pada dasarnya pernikahan tidak boleh dilakukan dengan senagaja, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan

⁵⁴ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)* Juz 13, (Darul Fikri), h. 199

dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.⁵⁵

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Pada skripsi tersebut pernikahan ulang terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan pada pernikahan yang pertama, sehingga diwajibkan melakukan pernikahan ulang.

2. Skripsi oleh Nurhaya Saili (2017) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (*Tajdid An-Nikah*) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Kendari, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Syariah. Penelitian ini menarik pada permasalahan di mana seorang istri yang ditalak raj’i hamil oleh suami yang telah menalakinya. Oleh sebab itu mereka pun melangsungkan pernikahan ulang secara sah menurut agama dan tercatat dalam KUA. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa nikah ulang karena hamil

⁵⁵Cut Nanda Mayasari, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), (*Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, 2017), h. ii.

di luar nikah wajib dilakukan, agar anak yang dilahirkan bukan anak haram.⁵⁶

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan ulang tersebut. Pada skripsi tersebut faktor yang menjadi penyebab pernikahan ulang adalah karena seorang istri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya, kemudian hamil dengan suami yang sudah menalakinya.

3. Skripsi Humairoh (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Syarifhidayatullah, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fiqh. Penelitian ini menarik pada permasalahan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan ulang setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi TKI/TKW dan kemudia kembali ke rumahnya mereka wajib melakukan pernikahan ulang. Meskipun hubungan , hak dan kewajiban antara keduanya baik dan tidak ada niat maupun kata *talaq* dari salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mereka tidak menyimpang dari

⁵⁶Nurhaya Saili, Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (*Tajdid An-Nikah*) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sulawesi Selatan), (*Skripsi* Program Studi Syariah UIN Kendari, 2017), h. ii.

hukum Islam yang memperbolehkan adanya *tajdid* akad, bahwa akad yang baru itu bukan berarti menasakh akad yang lama tapi dia hanya memperbaharuinya.⁵⁷

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pernikahan ulang tersebut. Pada skripsi terdahulu, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan ulang tersebut karena pasangan suami istri yang terpisah lama, karena salah satu dari mereka menjadi TKI, sehingga pasangan tersebut harus melakukan pernikahan ulang. Hal itu sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut.

⁵⁷Humairoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang), (*Skripsi* Program Studi Konsentrasi Perbandingan Madzab Fiqh, 2017), h. iv.



A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Pesisir Tengah

Kecamatan Pesisir Tengah dengan Ibukota Kelurahan Pasar Krui resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Kecamatan Pesisir Tengah yang pada mulanya merupakan wilayah Kwedanan Krui yang dibentuk pada kwartal pertama tahun

1949. Dengan wilayah berasal sebagian dari wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Pesisir Selatan.

Ketika dalam perjalanan Kwedanaan Krui yang ketika itu berada dalam pengawasan Kabupatn Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, kemudian terjadi perubahan kembali, hal ini terjadi karena masyarakat Kwedanaan Krui memilih bergabung dengan pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Utara.

Usulan Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat mulai dirintis, Kecamatan Pesisir Tengah merupakan salah satu Kecamatan Prioner dari 6 (enam) Kecamatan Induk yang ada saat itu.

2. Keadaan Demografis dan Geografis Kecamatan Pesisir Tengah

a. Keadaan Umum

Kecamatan Pesisir Tengah resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Dan dengan dibentuknya Kecamatan Way Krui dan Kecamatan Krui Selatan berdasarkan Perda Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2010, maka wilayah Kecamatan Pesisir Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Krui
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat

Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah Memiliki Luas 120.64 Km. Peruntukan wilayah Kecamatan Pesisir Tengah sebagian besar adalah digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan dan sisanya terbagi dalam berbagai peruntukan seperti pemukiman, penduduk, pariwisata, perdagangan, perikanan, peternakan, fasilitas umum dan lain-lain.

b. Luas Kecamatan Pesisir Tengah

Tabel. I
Pembagian Wilayah Pesisir Tengah

| No. | Nama Pekon/Kelurahan | Luas Wilayah (KM ²) |
|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Way Redak | 2.79 |
| 2. | Seray | 2.25 |
| 3. | Kampung Jawa | 3.45 |
| 4. | Rawas | 4.64 |
| 5. | Suka Negara | 3.63 |
| 6. | Pahmungan | 3.28 |
| 7. | Pasar Krui | 9.83 |
| 8. | Pasar Kota Krui | 1.39 |
| Jumlah | | 31.2 |

Sumber: SK Bupati

c. Geografi

Letak Kecamatan Pesisir Tengah pada koordinat $05^{\circ} 02'18''$

Lintang Selatan dan $103^{\circ} 56'05''$ Bujur Timur.

3. Keadaan Penduduk di Kecamatan Pesisir Tengah

Penduduk kecamatan Pesisir Tengah terdiri dari penduduk asli (Lampung) dan penduduk pendatang dari luar daerah seperti, Sunda, Jawa, Palembang, Bali, Madura, dan Bengkulu. Jumlah kepala keluarga di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah berjumlah 6.386 KK dengan perincian 16.291 orang laki-laki dan 15.542 orang perempuan.

Selain itu, Kesadaran terhadap kehidupan beragama di Kecamatan Pesisir Tengah cukup baik. Ini terlihat dari cukup baiknya ibadah di Kecamatan Pesisir Tengah, dilihat dari segi agama penduduk sebagian besar penduduk pesisir Tengah beragama Islam dengan Jumlah 19.746 jiwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 19 masjid dan 15 mushola. Dengan warganya yang menganut agama Islam, maka kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat banyak diwarnai oleh unsur-unsur budaya Islam, seperti peringatan hari besar Islam, pengajian rutin, yasinan, hajatan dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat Islamiyah.

4. Keadaan Ekonomi di Kecamatan Pesisir Tengah

Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, di antaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan, dan jauh tidaknya rumah penduduk

dengan lokasi industri. Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah merupakan wilayah yang terdiri dari tanah pertanian/perkebunan, dan perairan. Sehingga dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat adalah pertanian. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang, nelayan, peternak dan lain-lain. Berikut rincian kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah:

Tabel. II
Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah

| No. | Mata pencaharian | Jumlah warga |
|-----|------------------|--------------|
| 1. | Petani/Pekebun | 963 Orang |
| 2. | Pedagang | 219 Orang |
| 3. | Nelayan | 8 Orang |
| 4. | Peternak | 14 Orang |
| 5. | Buruh Tani | 137 Orang |
| 6. | Jasa | 14 Orang |
| 7. | Pengrajin | 9 Orang |
| 8. | Pekerja Seni | 4 Orang |
| 9. | Pensiunan | 22 Orang |
| 10. | Lainnya | 10.30 Orang |

Sumber: BPS Lampung Barat

Satu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah mereka yang mencari nafkah dengan cara merantau ke kota. Hal ini dilakukan karena mereka merasa apabila hanya bekerja di desa, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

5. Keadaan Sosial Budaya di Kecamatan Pesisir Tengah

Kehidupan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat masih cukup kuat dalam masalah kekerabatan dan kekeluargaan. gotong royong adalah hal yang lazim dijumpai di masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah. Masyarakat biasanya masih melakukan pekerjaan sulit dengan cara bergotong royong dan secara suka rela. Misalnya dalam hal membangun rumah warga. Masyarakat mengerjakan bersama, kemudian membuat saluran pembuangan air masyarakat juga melakukan dengan cara bergotong royong, dan segala hal yang berkaitan dengan fasilitas umum.

Secara umum masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah dalam kehidupan sehari-hari berjalan harmonis. Mereka saling menghormati satu sama lain walaupun secara ideologi terdapat perbedaan, akan tetapi tidak sampai menimbulkan perpecahan.

Adat budaya, masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah juga termasuk masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang yang sudah temurun hanya saja sekarang sudah mulai mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, seperti hal-hal yang dianggap musyrik diganti hal-hal yang bersifat Islami.

Akan tetapi tidak semua masyarakat dalam hal ini setuju secara keseluruhan, ada sebagian masyarakat yang masih kuat memegang tradisi nenek moyang dan tidak mau untuk mengikuti apa yang sekarang sudah berjalan, apalagi masyarakat yang secara umur sudah tergolong tua.

Walaupun ada perbedaan pandangan mengenai adat istiadat dan budaya, akan tetapi secara sosial mereka tetap menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Secara umum tetap menghargai perbedaan persepsi tentang adat dan tradisi nenek moyang.

B. Praktik Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah

Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang berlaku berdasarkan syariat. Adanya tradisi nikah ulang yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terjadi karena banyak faktor. Faktor pertama adalah seorang suami yang berpisah dengan istrinya dalam waktu yang cukup lama. Namun perpisahan tersebut bukan dikarenakan perceraian tetapi alasan lain yang menyebabkan mereka berpisah. Contohnya adalah seorang suami yang menjalani hukuman penjara. Sehingga setelah suami terbebas dari penjara, pasangan suami istri tersebut melakukan pernikahan ulang dengan tujuan memperbaiki rumah tangga mereka dan untuk menciptakan keharmonisan.

Faktor kedua adalah karena pernikahan yang tidak direstui dari kedua orang tua tetapi pasangan tersebut tetap melangsungkan pernikahan.

Sehingga ketika kedua orang tua tersebut memberikan restu, pasangan tersebut menjalankan pernikahan ulang.

Faktor ketiga karena hamil di luar nikah. Ketika pasangan melakukan pernikahan dikarenakan wanita dalam keadaan hamil, maka setelah melahirkan pasangan tersebut harus melaksanakan pernikahan ulang. Hal tersebut menjadi tradisi yang wajib dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupateng Pesisir Barat. Masyarakat di Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat melakukan nikah ulang karena mereka diperintah oleh kedua orang tuanya yang beranggapan bahwa apabila melakukan pernikahan dalam keadaan hamil maka harus melakukan nikah ulang pada saat bayi dalam kandungan lahir.⁵⁸

Faktor keempat adalah sebagai perekat hubungan antara suami dan istri karena usia pernikahan yang lama. Hal tersebut adalah faktor yang paling dominan terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat. Misalnya adalah ketika pasangan suami istri telah menikah selama 10 tahun maka mereka akan melaksanakan pernikahan ulang tersebut untuk memperkuat ikatan mereka, dan menciptakan keharmonisan yang mungkin sudah berkurang. Setelah pernikahan mereka berumur 20 tahun mereka akan memperbarui pernikahan mereka lagi dengan cara nikah ulang. Tentu saja pernikahan tersebut mereka lakukan dengan tujuan yang baik, yakni untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka dan menciptakan keharmonisan rumah tangga.

⁵⁸Brazi (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.

Masyarakat di Pesisir tengah kabupaten pesisir barat secara umum tidak memperlmasalahkan kasus ini, bahkan sebagian mereka mendukung pernikahan ulang ini. Karena mereka beralasan seperti apa yang sudah diterangkan di atas, yakni mereka melakukan pernikahan untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka dan menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan ulang, sebagai berikut:

Menurut pendapat Rosep, dia dan istrinya sudah menikah selama 5 tahun. Rosep dan istri harus berpisah selama 1 tahun karena dia harus menjalani hukuman penjara. Setelah dia dibebaskan, dia dan istri melakukan pernikahan ulang untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga mereka yang sempat hilang karena berpisah cukup lama. Dengan dilaksanakannya pernikahan ulang tersebut, Rosep dan istri berharap ikatan pernikahannya akan lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya.⁵⁹

Menurut pendapat Brazi, yang juga melakukan pernikahan ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dia dan istri melakukan pernikahan ulang karena pada awal pernikaham mereka tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, khususnya ibu dari pihak isri. Seiring berjalannya waktu, hati sang ibu pun luluh dan kemudian merestui hubungan mereka. Karena hal tersebut dia dan istrinya melakukan

⁵⁹Rosep (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.

pernikahan ulang untuk memperbarui hubungan pernikahan mereka agar lebih bahagia setelah mendapat restu.⁶⁰

Sama halnya dengan pasangan di atas, pasangan Fatoni dan istri pun melaksanakan pernikahan ulang tetapi dengan faktor yang berbeda. Menurut Fatoni, dirinya dengan istrinya melakukan pernikahan ulang karena faktor sudah lamanya umur pernikahan mereka. Pernikahan mereka sudah memasuki tahun kesepuluh pernikahan sehingga mereka melakukan pernikahan ulang dengan tujuan untuk mempererat pernikahan mereka dan menambahkan keharmonisan rumah tangga mereka. Hal tersebut merupakan tradisi turun temurun di keluarganya.⁶¹

Uraian wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat merupakan pernikahan antara suami dan istri yang masih memiliki ikatan sah sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka dan menciptakan keharmonisan rumah tangga mereka.

1. Pelaksanaan Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat


Nikah ulang ini sering kali dipakai oleh masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal memperbaharui nikah, atau membangun nikah. Pembaharuan nikah ini dilakukan pasangan suami istri untuk memperbaiki bahtera rumah

⁶⁰Brazi (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.

⁶¹Fatoni (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.

tangga mereka, agar terhindar dari segala sesuatu yang memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Sehingga pernikahan ulang oleh masyarakat setempat dijadikan sebagai adat dengan tujuan yang baik.⁶²

Jika dalam pernikahan pada umumnya terdapat rukun dan syarat, maka dalam nikah ulang pun terdapat rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat dalam nikah ulang adalah sama sebagaimana rukun dan syarat dalam pernikahan. Adapun rukun nikah adalah:

- 
- a) Mempelai laki-laki;
 - b) Mempelai perempuan;
 - c) Wali;
 - d) Dua orang saksi;
 - e) Shigat ijab kabul.⁶³

Mekanisme pelaksanaan *tajdid an-nikah* yang dilakukan pasangan-pasangan tersebut dilakukan hampir seperti pernikahan pada umumnya, dengan rukun dan syarat yang diyakini harus terpenuhi. Seperti wali, saksi, dan akad nikah. Pasangan suami istri yang melakukan nikah ulang pun hanya mengundang tetangga untuk menghadiri pernikahan ulang yang mereka lakukan.

Prosesi pernikahan pada umumnya diawali dengan menggunakan syahadat, sama seperti *tajdid an-nikah* yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada akhir

⁶²Marsidi (Tokoh Adat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal, 12 November 2019.

⁶³Moh. Sobari (Pencatat Buku Nikah), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal, 12 November 2019.

pelaksanaan juga diakhiri dengan doa, ini pun tidak berbeda dengan mekanisme pernikahan pada umumnya.⁶⁴

Namun sedikit berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang merayakan pernikahannya, pada pembaharuan nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat ini lebih tertutup dan hanya sebagian keluarga kecil saja yang mengetahuinya.

Tradisi nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dilakukan suami istri yang memiliki motivasi tertentu dengan harapan perbaikan kehidupan dalam berumah tangga. Mereka biasanya melakukannya di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk menikahkan mereka kembali. Mereka biasanya mengundang keluarga atau kerabat dekat sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan pernikahan ini.

Praktik pernikahan ulang di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat lebih didominasi karena faktor adat kebiasaan, di mana adat kebiasaan tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Biasanya pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, kemudian pasangan suami tersebut melakukan pernikahan ulang untuk mempererat dan menciptakan keharmonisan rumah tangga yang sudah memudar karena faktor usia pernikahan. Hal tersebut mereka lakukan karena sudah menjadi

⁶⁴Muhammad Ikhsan (Penghulu), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal, 15 November 2019.

kebiasaan dan hal yang lumrah pada masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Perkawinan ditunjukkan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menciptakan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anak serta keluarganya, dan juga untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan syariat yang ada.

Namun terkadang dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut terjadi halangan-halangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam menjalin sebuah keluarga. Halangan-halangan tersebut menjadi alasan terhentinya atau terputusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri. Dalam Islam sendiri telah memperbolehkan terjadinya putus perkawinan, jika memiliki alasan untuk kebaikan hidup dalam rumah tangga tersebut. Namun Allah Swt. pun juga sangat membenci adanya perceraian.

Putusnya suatu pernikahan memang sangat berat dirasakan oleh setiap pasangan suami istri. Banyak dari mereka yang menginginkan hubungan harmonis kembali hidup dalam rumah tangganya. Namun untuk menghidupkan kembali rasa cinta mereka, memperbaharui akad nikah dirasa perlu dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

Masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat melakukan pembaharuan nikah atau *tajdid an-nikah* sebagai sarana untuk memperkuat hubungan rumah tangga mereka dan menciptakan keharmonisan rumah tangga tersebut. Menurut Pak Umar (tokoh masyarakat) sendiri nikah ulang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat di Pesisir Tengah karena beberapa faktor, di antaranya karena hubungan pernikahan yang tidak direstui, karena perpisahan yang lama antara suami istri tetapi bukan bercerai, faktor hamil di luar nikah, dan faktor adat.⁶⁵

a) Faktor hubungan pernikahan yang tak direstui

Masyarakat pesisir tengah kabupaten pesisir barat melakukan pernikahan ulang salah satunya disebabkan tidak direstainya hubungan mereka oleh kedua orang tua. Akan tetapi, pasangan tersebut tetap melakukan pernikahan. ketika orang tua akhirnya memberika restu, pasangan tersebut melaksanakan pernikahan ulang atau pembaharuan pernikahan, guna mempererat hubungan pernikahan mereka dan menjadi lebih bahagia.

b) Faktor Berpisah

Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan ulang karena berpisah cukup laam dengan pasangannya menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Namun berpisah di sini bukanlah

⁶⁵Umar (Tokoh Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 12 November 2019.

perceraian, melainkan karena sang suami harus menjalani hukuman penjara. Saat suami keluar dari penjara maka mereka pun melaksanakan pernikahan ulang.

c) Faktor hamil di luar nikah

Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan lantaran istri hamil di luar nikah, ketika melahirkan diharuskan melakukan pernikahan ulang. hal tersebut sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa was-was dan kekhawatiran akan status anak tersebut.

d) Faktor Adat

Faktor adat merupakan faktor yang paling dominan terjadinya pernikahan ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Apabila umur pernikahan sudah lama maka dianjurkan untuk melakukan pernikahan ulang, agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

BAB IV

ANALISA DATA

C. Praktik Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah

Praktik nikah ulang yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, seperti pada umumnya tradisi nikah ulang yang ada dalam masyarakat luas. Sebab-sebab terjadinya akad nikah ulang itu salah satunya adalah tradisi. Tradisi (*urf*) adalah bentuk

muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*urf*).

Pernikahan ini dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat bukan karena ada sebab hukum yang membatalkan pernikahan sebelumnya. tetapi karena adanya sebab lain, yakni salah satunya yang paling dominan adalah karena faktor adat.

Bentuk nikah ulang atau *tajdid an-nikah* yang dilaksanakan oleh beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat adalah menyerupai bentuk akad nikah pada umumnya. Yaitu dengan menggunakan minimal dua saksi, ijab qabul (akad nikah), wali, dan tentunya kedua mempelai. Ijab qabul yang diucapkan juga sama persis seperti pernikahan biasanya. Perbedaan jelas pada mempelai, pada akad pernikahan mempelai belum mempunyai ikatan perkawinan, namun pada *tajdid an-nikah* atau nikah ulang mempelainya merupakan pasangan suami istri yang masih memiliki ikatan perkawinan namun dalam keadaan terombang-ambing.

Proses pelaksanaan nikah ulang biasanya dilakukan di rumah salah satu mempelai atau di tempat orang yang akan menikahkan mereka. Proses pernikahan ulang ini dilakukan tidak jauh beda dengan halnya proses pernikahan biasa. Hanya yang membedakan yaitu tidak adanya petugas dari KUA atau dari desa. Dalam urusan mahar juga pihak laki-laki

memberikan mahar kepada perempuan tetapi biasanya hanya sebatas perangkat alah sholat.

Jika dalam pernikahan umumnya terdapat rukun dan syarat, maka dalam kasus nikah ulang ini pun terdapat rukun dan syarat hanya saja dihadirkan orang-orang tertentu dengan tidak menghilangkan rukun dan syarat nikah, yakni:

1. Adanya suami;
2. Adanya istri;
3. Wali;
4. Saksi (minimal dua);
5. Ijab dan qabul
6. Mahar

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan pernikahan ulang ini tidak dihadiri oleh pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak dicatatkan karena sudah dicatat dalam pernikahan yang pertama, melainkan pasangan tersebut mencatat sendiri, sebab surat nikah yang mereka miliki tetap dianggap sah dan tidak batal serta tidak menggugurkan pernikahan yang pertama.

Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ini beralasan karena sebelum melakukan nikah ulang mereka terlebih

dahulu sudah melakukan pernikahan dan dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

Setidaknya dengan melakukan pernikahan ulang ini, keadaan rumah tangga diharapkan berjalan lebih baik dari sebelumnya, dan keuangan mereka tidak ikut terkuras hanya untuk mengurus perceraian yang bisa diperbaiki terlebih dahulu.

D. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Nikah Ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

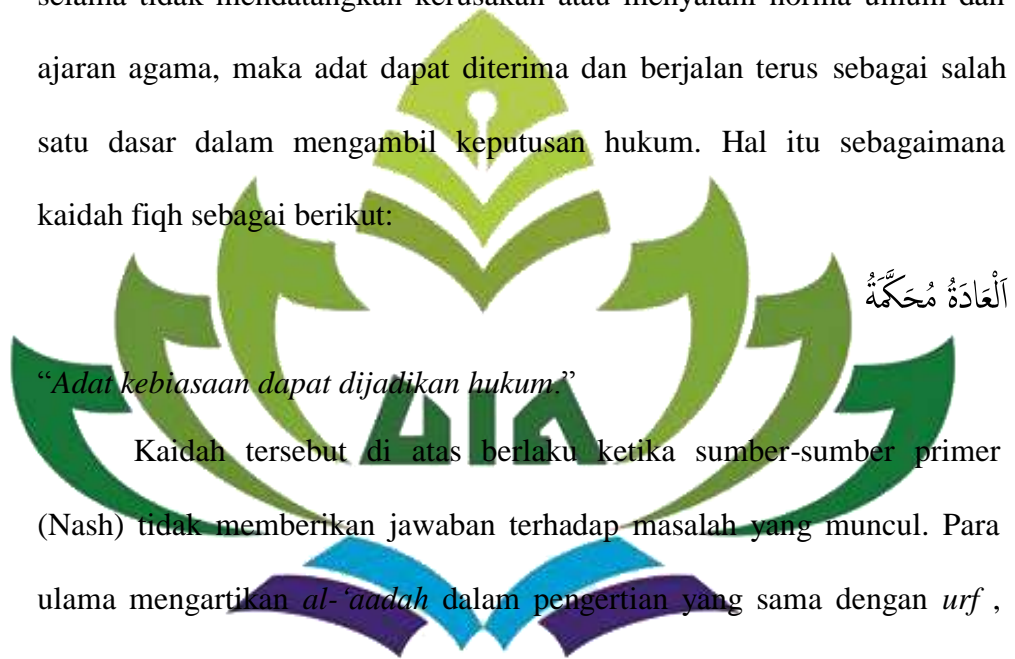
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebelum melangkah kepada pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terlebih dahulu peneliti membahas tentang pandangan hukum Islam tentang adat, untuk mendapatkan gambaran secara umum dan jelas bagaimana pandangan hukum Islam tentang adat atau tradisi.

Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan sebagai apa yang sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pengertian serupa juga disampaikan oleh Hasbi ash-Siddieqy bahwa adat adalah sesuatu yang oleh manusia dijadikan kebiasaan yang telah digemari kehidupan mereka.

Baik Khallaf dan Hasbi memandang adat itu harus berlaku umum, sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung, kaitannya dengan

kebiasaan yang berlaku umum ini ada dua permasalahan; (1) bahwa adat (kebiasaan) itu dipraktikkan oleh masyarakat, (2) adat dipraktikkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat tersebut hanya untuk masyarakat tertentu.

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal itu sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:



Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan dalam arti setiap anggota masyarakat menerimanya.

Penerimaan adat tersebut di atas didasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu dianggap baik oleh masyarakat maka dianggap baik oleh Allah Swt.

Patokan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian adat adalah ukuran *masalah mursalah*. Masalah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak.

Salah satu kegiatan masyarakat telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat adalah adanya tradisi pernikahan ulang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan ulang terjadi, seperti faktor hubungan yang tak direstui orang tua, faktor berpisah, faktor hamil di luar nikah, dan faktor adat.

Uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah ulang (*tajdid an-nikah*) merupakan adat yang kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia, maksudnya adalah bahwa dalam hal ini nash tidak memerintahkan akan tetapi juga tidak melarang.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa secara umum hukum Islam menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar'i. Tradisi nikah ulang yang terjadi di

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu pilihan bagi pasangan suami istri untuk memperbaharui pernikahannya.

Jadi, tradisi nikah ulang dalam pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan. Nikah ulang tersebut sebagai bentuk tindakan kehati-hatian untuk menghilangkan rasa was-was dan penguat pernikahan yang pertama.

Nikah ulang dalam hukum positif tidak diatur secara konkrit. Namun, dijelaskan secara tersirat mengenai pernikahan yang sah secara hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pernikahan ulang tidak perlu dilakukan apabila sudah sah menurut hukum.

Hasil dari penjelasan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, tradisi nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif adalah sah, dengan syarat nikah ulang tersebut bertujuan untuk menguatkan pernikahan yang pertama



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun dalam judul skripsi “
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tradisi Nikah Ulang

(Studi di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir merupakan pembaruan pernikahan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang status pernikahannya sah, baik secara hukum Islam maupun hukum Positif. Tujuan nikah ulang tersebut adalah untuk mempererat hubungan pernikahan tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari hukum Islam adalah boleh. Dengan alasan bahwa nikah ulang tersebut bertujuan untuk memperbaharui akad bukan untuk membuat akad baru. Akibat hukumnya akad pernikahan yang pertama tidak rusak karena *tajdid* akad hanya memperbaharui akad bukan memfasakh akad yang pertama. Tradisi nikah ulang (*tajdid an-nikah*) tersebut dilakukan dalam bentuk *ihthiyath* (kehati-hatian). Tradisi tersebut dapat dikategorikan *urf* yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga Islam tidak melarang adanya tradisi nikah ulang tersebut. Sedangkan tradisi nikah ulang menurut hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak perlu melakukan nikah 2 (dua) kali.” Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan ulang dalam hukum positif diperbolehkan, karena tidak ada undang-undang yang melarang tentang pernikahan ulang. Nikah ulang yang terjadi di Kecamatan

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat merupakan tradisi/adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sehingga Undang-Undang pun mengembalikan hukum tersebut kepada masyarakat. Selama tradisi tersebut berakibat baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka hukum tradisi nikah ulang tersebut adalah boleh.

B. Rekomendasi

Sebagai akhir dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada para pihak:

1. Bagi masyarakat muslim mengerjakan suatu ibadah yang sudah jelas perintahnya dalam Al-Quran dan Hadist merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan hukum dari segala perkara harus dikembalikan kepada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan Hadist.
2. Melaksanakan suatu perintah adat (tradisi) dalam masyarakat sepatutnya kita perlu kritis dalam menanggapi, perlu mengetahui dalil hukum dan alasan-alasannya, agar apa yang kita laksanakan tidak hanya sekedar *taqlid* saja.
3. Pemerintahan setempat diharapkan melakukan sosialisasi secara intensif tentang adanya nikah ulang kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam pemahaman nikah ulang (*tajdid an-nikah*) ini di tengah-tengah masyarakat.
4. Peneliti menghimbau kepada para remaja, supaya lebih berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, dan untuk menjauhi segala yang

berkaitan dengan kemaksiatan, karena di era globalisasi sekarang ini banyak terjadi pelanggaran norma dan etika.

5. Bagi orang tua untuk selalu mengawasi, menasihati, membimbing dan mengontrol anak-anaknya akan bahayanya zina dan dampak akibat perzinaan. Dan juga bagi lapisan masyarakat turut serta membimbing para remaja agar tidak terjerumus dan bisa mengendalikan diri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazh*, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.

Abror, Khoirul, *Hukum Perwakinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.,

Abror, Khoirul, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), (*Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016).

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Su Laiman Mar'iy, T.,t.p.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1, 1995.

Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah* Cet ke 3, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, cet-1, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet ke- 7*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Aziz, Shaleh bin Abdul, *Nikah Dengan Niat Talak?* Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1994.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Nikah* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994.

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Effendi, Satria, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.

Eliza, Mona, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Ciputat: Adelina Bersaudara, 2009.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Cet ke 1, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.

Hakim, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Elemen., 1974.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi'*, Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, 2009.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Munir dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nuruddin, Amiur dkk, *Hukum Perdatata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), Cet., Ke-3. h. 43. Lihat juga, Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillco, 1990.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976.
- Syahr, Saudus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Mulia, 2007.
- Syahrani, Riduan , *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* Cet 1, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Wawancara

- Brazi (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.
- Fatoni (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.
- Marsidi (Tokoh Adat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal, 12 November 2019.

Moh. Sobari (Pencatat Buku Nikah), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal, 12 November 2019.

Muhammad Ikhsan (Penghulu), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal, 15 November 2019.

Rosep (Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 10 November 2019.

Umar (Tokoh Masyarakat), Wawancara dengan Penulis, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, 12 November 2019.